KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Timsel KPU-Bawaslu Perlu Masifkan Partisipasi Publik
Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Timsel KPU-Bawaslu Perlu Masifkan Partisipasi Publik

TIM seleksi (timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2017 diminta melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya dalam setiap proses rekrutmen. Hal itu menjadi salah satu poin urgen dari sejumlah rekomendasi yang dibuat koalisi masyarakat sipil pegiat kepemiluan.

"Tim seleksi KPU dan Bawaslu harus melakukan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan," ujar peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif M Ihsan Maulana, kemarin.

Rekomendasi lain ialah timsel juga harus memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Dalam menanggapi itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang juga Sekretaris Timsel Bahtiar mengatakan timsel berkomitmen membuka akses publik seluas-luasnya di seluruh tahapan. Masyarakat bisa memberikan masukan dan informasi pada timsel.

"Tugas dari timsel ialah melakukan seleksi bakal calon penyelenggara pemilu menjadi calon. Karena itu, kita membuka akses publik seluas-luasnya di seluruh tahapan karena berkaitan dengan rekam jejak orang yang mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu," terang Bahtiar ketika dihubungi, kemarin.

Berdasarkan Undang-Undang No7/2017 tentang Pemilu, timsel diminta melakukan proses rekrutmen dan menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu RI kepada presiden. Nama-nama tersebut, terang Bahtiar, akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Lalu, prosesnya dilanjutkan di DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan dan DPR memilih 7 calon anggota KPU serta 5 calon anggota Bawaslu RI.

Ketua DPR Puan Maharani berharap timsel bisa mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftar menjadi calon penyelenggara pemilu.

"Supaya nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang dikirim Presiden untuk *fit and proper test* di DPR nantinya juga yang terbaik dan pada akhirnya DPR akan memilih yang terbaik dari terbaik untuk menyelenggarakan pemilu," kata Puan di Jakarta, kemarin.

Puan menegaskan penyelenggaraan pemilu harus berjalan baik demi terjaminnya hak konstitusional warga. Hal itu membutuhkan penyelenggara yang cakap, kredibel, berintegritas, dan independen. (Ind/Sru/P-2)